

Di Bawah Spirit Liberal-Institusionalisme: Kajian Komparatif Gagasan *Dynamic equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*

Dinar Elly Ardianti
Mohamad Rosyidin
Muhammad Faizal Alfian
Universitas Diponegoro

Abstract

This article aims to compare two Indonesia's foreign policy ideas, namely, dynamic equilibrium and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). It treats both ideas as an analytical tool instead of propositions to be tested against empirical evidence. Using liberal-institutionalism approach, this article argues that despite both ideas applies in the Indo-Pacific region, both have different characteristics. While dynamic equilibrium can be regarded as a foreign policy doctrine which only proposes the basic principles of interstate relations, AOIP is a cooperative framework which becomes policy guidance for countries in the region. However, both ideas conforms liberal-institutionalism premises that international regimes matter because it provides set of rules for cooperation rather than rivalry, recover ASEAN's role as a key actor in the region, promote dialogue in dispute settlement, and gain economic development.

Keywords: *dynamic equilibrium; ASEAN Outlook on the Indo-Pacific; ASEAN; Indonesian foreign policy; liberal-institutionalism*

Abstrak

Artikel ini bertujuan membandingkan dua gagasan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Artikel ini memperlakukan kedua gagasan sebagai perangkat analitis alih-alih proposisi yang diuji dengan bukti empiris. Menggunakan pendekatan liberal-institusionalisme, artikel ini berargumen bahwa walaupun kedua gagasan berlaku di kawasan Indo-Pacific, keduanya memiliki perbedaan karakteristik. Sementara dynamic equilibrium dapat dipandang sebagai doktrin kebijakan luar negeri yang hanya mengemukakan prinsip dasar hubungan antarnegara, AOIP merupakan kerangka kerjasama yang menjadi pedoman kebijakan bagi negara-negara di kawasan. Meskipun demikian, kedua gagasan sejalan dengan premis liberal-institusionalisme bahwa rezim internasional penting karena menyediakan seperangkat aturan untuk bekerjasama ketimbang rivalitas, memulihkan peran ASEAN sebagai aktor kunci di kawasan, mendorong dialog dalam penyelesaian konflik, serta mendorong perkembangan ekonomi.

Kata-kata kunci: *dynamic equilibrium; ASEAN Outlook on the Indo-Pacific; ASEAN, kebijakan luar negeri Indonesia; liberal-institusionalisme.*

Pendahuluan

Kebangkitan Cina sejak 1970-an menjadi awal terbentuknya geopolitik dunia abad ke-21. Cina mengalami tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil melebihi 10% setiap tahun (Fels, 2016: 6). Menurut perkiraan IMF, nominal PDB Cina pada tahun 2018 mencapai \$ 13,4 triliun atau 65,3% dari ukuran ekonomi AS (Morrison, 2019: 9). Lebih jauh lagi, Cina juga memodernisasi kekuatan militernya melalui *People Liberation Army* (PLA) (Hasian, 2021). Kemudian, Amerika Serikat mulai membatasi pergerakan Cina. Dalam bidang ekonomi, lebih dari 800 produk Cina di sektor industri, transportasi, barang elektronik dan peralatan medis, dikenakan pajak impor senilai 25% oleh pemerintah AS (Febrina et al., 2018: 146). Di bidang militer, AS hadir dan menindaklanjuti sengketa Kepulauan Paracel dan Spratly dengan mencoba memfasilitasi resolusi multilateral atas klaim Laut China Selatan yang tumpang tindih (Chang, 2011: 21). Dalam bidang politik, AS banyak terlibat dalam forum-forum kerja sama di kawasan Asia Pasifik, seperti *Trans Pacific Partnership* (TPP) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Pada akhirnya, kebangkitan Cina menyebabkan kondisi *rebalancing* atau menyeimbangkan kembali terhadap kekuatan AS.

Sehubungan dengan meningkatnya rivalitas kawasan, Indonesia memiliki kepentingan untuk turut mencari solusi atas permasalahan tersebut. Indonesia, sebagai *rising middle power*, berupaya memperkuat perannya di kawasan Asia Pasifik guna menghindari konflik regional atau *condominium of power* antara dua negara adidaya (Poling, 2013). Oleh sebab itu, Marty Natalegawa mengemukakan sebuah gagasan yang disebut *dynamic equilibrium* atau keseimbangan dinamis. Melalui kerangka kerja sama dari *dynamic equilibrium*, Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif (Adhistry, 2015: 5). Menteri Marty menjelaskan *dynamic equilibrium* dalam dua terminologi, "*dynamic*" menunjukkan pengakuan terhadap perubahan konstan yang terjadi di kawasan dan "*equilibrium*" yang berarti keseimbangan.

Pergantian presiden Indonesia, dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo, tidak menyurutkan upaya Indonesia meredam rivalitas kawasan. Pada periode kedua Joko Widodo, rivalitas menajam akibat perang dagang antara AS dan Cina. Presiden Jokowi khawatir situasi tersebut akan menjadi "*multi-front war*" (Kementerian Luar Negeri, 2019). Akhirnya, Indonesia mencetuskan Konsep Indo-Pasifik untuk merespon rivalitas kawasan. Menurut '*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*', Konsep Indo-Pasifik didefinisikan sebagai perspektif ASEAN memandang kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia sebagai kawasan terpisah yang

terintegrasi dan saling berhubungan. Terminologi Indo-Pasifik sendiri merupakan akronim dari *Indian Ocean* dan Asia Pasifik.

Beberapa penelitian terdahulu membahas kedua gagasan secara terpisah. Misalnya dalam tulisan Milner (2019), gagasan *dynamic equilibrium* dikatakan menjadi kunci dalam reposisi Indonesia di tengah kuatnya pengaruh barat terhadap kawasan. Kemudian, Sebastian (2014) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia, di bawah pimpinan Presiden SBY, tidak benar-benar memprioritaskan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut lagi, penelitian terkait gagasan AOIP terdapat dalam karya Anwar (2020) yang berpendapat bahwa AOIP memiliki prospek sebagai *platform* kerjasama sekaligus menerima pandangan skeptis karena hanya berisi panduan, bukan teknis kerjasama. Sedangkan, Ha (2019) berpendapat bahwa dokumen AOIP penting bagi negara-negara ASEAN terutama dalam menunjukkan pandangan kolektif terhadap kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, kajian komparatif kedua gagasan ini termasuk penelitian penting karena menyangkut preferensi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan karakteristik gagasan *dynamic equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi landasan bagi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi politik luar negeri. Di samping itu, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap studi Asia Tenggara, kebijakan luar negeri Republik Indonesia, serta teori liberal-institusionalisme.

Penelitian ini adalah penelitian komparatif deskriptif yang bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan karakteristik gagasan *dynamic equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Penelitian komparatif berbeda dari penelitian non-komparatif dalam upaya mencapai kesimpulan di luar kasus tunggal dan menjelaskan perbedaan serta persamaan antara objek analisis dan hubungan antar objek dengan latar belakang kondisi kontekstual mereka (Esser & Vliegenthart, 2017: 2). Ada empat syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan metode analisis komparatif. Pertama, tujuan komparasi terhadap objek penelitian harus jelas dan menjadi komponen penentu desain penelitian. Kedua, unit besar perbandingan harus diidentifikasi. Ketiga, objek analisis harus dibandingkan dengan satu atau lebih dimensi umum yang ekuivalen secara fungsional. Keempat, objek analisis harus dibandingkan atas dasar kerangka teori umum. Lebih lanjut lagi, ada 4 tahap dalam melakukan metode analisis komparatif: (1) membandingkan insiden yang berlaku untuk setiap kategori, (2) mengintegrasikan kategori dan propertinya, (3) membatasi teori, dan (4) menulis teori. Metode ini biasanya digunakan

dalam menguji hipotesis dan bisa berkontribusi pada penemuan tak terduga dari hipotesis baru dan membangun teori. Tipe penelitian ini menggunakan pola berfikir deduktif yang berangkat dari hal-hal umum, menuju hal-hal khusus. Namun, dalam penelitian deduktif, pengumpulan dan analisis data ditempatkan sebagai alat analisis, bukan sebagai proposisi yang akan diuji kebenarannya.

Penulis menggunakan metode komparatif deskriptif untuk mengolah data yang telah didapatkan. Umumnya, metode komparatif ini menggunakan studi kasus tunggal ataupun dalam jumlah yang kecil. Penelitian komparatif juga memusatkan tujuan pada relevansi penjelas dari lingkup kontekstual dan untuk memahami bagaimana konteks sistemik membentuk fenomena secara berbeda dalam pengaturan yang berbeda. Dengan begitu, penelitian ini dapat mendeskripsikan persamaan dan perbedaan karakteristik di antara gagasan *dynamic equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Liberal-institusionalisme: sebuah kerangka teori

Pada dasarnya, negara-negara tidak dapat menghindari interaksi satu sama lain. Dari titik inilah interdependensi terbentuk. Negara-negara akan saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akhirnya, negara harus melaksanakan kerjasama karena telah terdesak oleh kondisi tersebut. Untuk meringkas secara lebih formal, kerjasama antar pemerintah (negara) terjadi ketika kebijakan yang benar-benar diikuti oleh satu pemerintah dianggap oleh mitranya memfasilitasi realisasi tujuan mereka sendiri, sebagai hasil dari proses koordinasi kebijakan (Keohane, 1984: 52). Konsepsi dunia seperti ini dicetuskan oleh kaum liberalisme.

Pada perdebatan hubungan internasional pertama, paradigma liberalisme hadir sebagai kritik terhadap paradigma realisme. Realisme percaya bahwa politik diatur oleh hukum obyektif yang berakar pada sifat manusia (Morgenthau, 1997: 4). Sifat dasar manusia yang jahat membuat negara-negara saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan menyebabkan terjadinya banyak peperangan di dunia dan membuat kondisi dunia tidak damai. Realisme juga beranggapan bahwa negara akan selalu menaruh kecurigaan satu sama lain. Meskipun kerjasama telah diupayakan, hasil dari kerjasama tersebut tidak akan seimbang. Satu pihak akan menang dan pihak yang lain akan kalah atau merasa dirugikan. Kondisi ini biasa disebut sebagai *zero sum game* dalam *game theory*. Sedangkan, berbanding terbalik dengan realisme, liberalisme justru sangat percaya bahwa perdamaian akan tercapai jika negara-negara di dunia mau bekerjasama dalam sebuah wadah. Alih-alih menggunakan

teori permainan (*game theory*) seperti realisme, liberalisme justru mengutamakan *win win solution* dalam menjalankan kerjasama.

Sebagai sebuah paradigma, liberalisme memiliki berbagai aliran teori. Salah satu alirannya adalah teori liberalisme institusionalis atau biasa juga disebut neoliberal institusionalis. Robert Owen Keohane merupakan salah satu tokoh penting dalam teori liberalisme institusionalis. Keohane tidak menolak klaim neorealis yang mengatakan bahwa selain dipengaruhi sifat dasar manusia, struktur dunia yang anarki juga membuat kerjasama sulit dilaksanakan. Struktur anarki dapat diartika sebagai kondisi yang tidak aman dan penuh kecurigaan. Kondisi ini menekan semua negara untuk menjadi paling unggul supaya dapat menghindari ancaman. Sebagai konsekuensi, negara-negara di dunia sulit mencapai sebuah kesepakatan. Kemudian pandangan skeptis ini berusaha dijawab oleh kaum institusionalis. Kaum institusionalis memiliki optimisme terhadap kerjasama di antara negara-negara. Menurut institusionalis, solusinya adalah lewat perantara rezim internasional (Rosyidin M. , *Liberalisme*, 2020: 53). Teori ini dapat menjembatani perbedaan di antara neorealisme dan liberalisme. Maka dari itu, teori liberalisme institusionalis dianggap relevan untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

Rezim internasional atau institusi internasional merupakan konsep kunci dalam teori liberalisme institusionalis. Rezim mampu menyediakan kerangka atau aturan kerjasama yang mengikat dan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing anggota kerjasama (Keohane, 1982: 338). Aturan ini bukan hanya mengacu pada nilai, norma, maupun prinsip internasional, melainkan harus bisa mengakomodir kepentingan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam teori liberal institusionalis ada perbedaan makna di antara norma dan aturan. Jika norma sangat sulit untuk diubah, maka aturan bersifat lebih fleksibel. Namun, aturan justru lebih spesifik menunjukkan secara lebih rinci tentang hak dan kewajiban khusus bagi anggota kerjasama (Keohane, 1984: 58). Klaim utama tentang rezim adalah bahwa negara dapat menghasilkan rezim dalam isu yang teridentifikasi, bahkan dalam isu yang mengarah pada penyimpangan, sehingga mempengaruhi perilaku mereka dan mendorong kerja sama (Levy, Young, & Zurn, 1995: 271). Liberalisme institusionalis juga membangun asumsi bahwa negara perlu mengembangkan strategi-strategi dan forum-forum bagi kerjasama meliputi seluruh rangkaian isu dan wilayah-wilayah baru (Pettiford & Pettiford, 2009: 130).

Negara sebenarnya mengalami masalah kolaborasi, dimana perilaku mementingkan diri sendiri berdampak pada hasil yang kurang baik (Stein, 2008: 208). Dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak negara, rezim internasional dapat turun tangan untuk memberikan "titik fokus yang

dibangun" sehingga membuat hasil kerja sama lebih menonjol (Keohane R. O., 1995: 45). Rezim internasional diharapkan dapat menghasilkan *output* maupun *outcome* yang menguntungkan bagi semua pihak. Kehadiran rezim-rezim internasional diharapkan dapat membuka peluang bagi semua negara untuk berada pada posisi sejajar. Sehingga, dalam sistem dunia tidak ada hierarki yang membuat satu negara memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan begitu, konflik di ranah internasional dapat dihindari.

Dalam memahami liberalisme institusionalis masih ditemukan kebingungan dalam memaknai penggunaan rezim atau institusi internasional dan organisasi internasional. Arthur A. Stein (2008) memberikan contoh dengan menggunakan hubungan di antara IAEA (*International Atomic Energy Agency*), NPT (*Non-Proliferation Treaty*), dan MTCR (*Missile Technology Control Regime*) sebagai upaya negara-negara mengatur poliferasi nuklir dan sistem pengirimannya. IAEA adalah organisasi internasional yang menghasilkan NPT. Kemudian beberapa tahun setelah NPT terbentuk, negara-negara penghasil rudal menginisiasi pembentukan MTCR. NPT dan MTCR dapat dianggap sebagai rezim atau institusi internasional (Stein, 2008: 204). Dalam penelitian ini, organisasi internasional yang dimaksud oleh peneliti adalah ASEAN. Kemudian ASEAN menghasilkan berbagai rezim internasional yang mewadahi kerjasama bersama negara-negara mitra. Salah satu rezim yang dihasilkan oleh ASEAN adalah Kerjasama Indo-Pasifik atau dalam penelitian ini disebut sebagai *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Rezim ini tidak menghasilkan organisasi yang baru lagi. Namun, ada pula beberapa rezim yang kembali melahirkan organisasi internasional.

Membandingkan dua gagasan

Dynamic equilibrium dan AOIP memiliki perbedaan signifikan dalam kuantitas butir prinsip-prinsip gagasan. Secara umum ada dua prinsip yang sering disinggung oleh Marty terkait *dynamic equilibrium*, yaitu persahabatan dan kerja sama. Menteri Marty menyampaikan bahwa "... *I am of the view that we should be ready to work towards an Indo-Pacific wide treaty of friendship and cooperation*" (CSIS, 2013). Sedangkan, AOIP memiliki kuantitas prinsip-prinsip yang lebih banyak, yakni berjumlah 13 butir. Dikutip dari Dokumen Final *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (2019), nilai-nilai tersebut antara lain penguatan sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, kerangka kerja sama berbasis aturan, *good governance*, menghargai kedaulatan, non-intervensi, komplementer terhadap kerangka kerja sama yang ada, kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Jadi,

dynamic equilibrium memiliki nilai atau prinsip yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan AOIP.

Dynamic equilibrium sejatinya merupakan doktrin kebijakan luar negeri yang digagas oleh Indonesia untuk kawasan. Namun, mengapa hanya sampai pada tingkatan doktrin? Ada dua alasan utama untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, gagasan ini belum melalui deliberalisasi oleh ASEAN. Yayan Mulyana, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, menjelaskan bahwa Doktrin Natalegawa belum melalui tahap multi-interpretasi dari negara anggota ASEAN, maupun pihak lain (Mulyana, 2022). Saat itu, Indonesia ingin menguatkan kepemimpinan sebagai ketua ASEAN dengan cara menjadikan doktrin ketua sebagai doktrin regional (Jati, 2023). Alasan kedua, Marty memiliki waktu yang sangat singkat untuk mengembangkan *Dynamic equilibrium*. Rentang waktu sejak kemunculan ide *dynamic equilibrium*, di tahun 2011, tidak cukup panjang untuk pengimplementasian gagasan tersebut (Raharja, 2022). Itulah sebabnya *dynamic equilibrium* hanya sampai pada tingkat doktrin.

Pada periode selanjutnya, AOIP lahir sebagai kerangka kerja sama di Indo-Pasifik. Dokumen ini terus dikembangkan dan direalisasikan melalui berbagai proyek. Lantas, mengapa AOIP justru diterima oleh negara-negara kawasan dan diadopsi oleh ASEAN? Jawabannya adalah gagasan ini tidak menonjolkan peran salah satu negara tertentu (Jati, 2023). Penyusunan *ASEAN Outlook* sangat diplomatis karena telah melalui diskusi bersama para negara anggota ASEAN. Sehingga, AOIP jauh lebih akomodatif terhadap preferensi masing-masing negara Asia Tenggara.

Terminologi “Indo-Pasifik” diperkenalkan oleh Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, tahun 2007 sebagai pertanda transformasi geopolitik kawasan. Saat itu, Abe berpidato di hadapan Parlemen India untuk menguraikan visinya tentang “pertemuan dua lautan” atau “*confluence of the two seas*” antara Hindia dan Pasifik (Sharma & Blaxland, 2022). Kemudian, gagasan FOIP dipromosikan oleh Jepang di Washington pada tahun 2017 dan 2018 hingga Departemen Pertahanan AS mengubah nama komando militer senior kawasan dari Komando Pasifik menjadi Komando Indo-Pasifik (Sharma & Blaxland, 2022). FOIP mengkhawatirkan bagi Cina karena mengindikasikan pergerakan aktif dari aliansi AS di Pasifik. Cina pun turut memberikan tantangan bagi Asia Tenggara, yakni mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonominya sambil menjaga kedaulatan dari bahaya ketergantungan yang berlebihan (Strangio, 2020: 56). Maka dari itu, ASEAN sebagai organisasi di kawasan Indo-Pasifik perlu terlibat dalam meredam rivalitas ini. Lantas, bagaimana ASEAN harus memposisikan diri di kawasan?

Dynamic equilibrium menjawab pertanyaan tersebut. Pertama-tama, ASEAN harus paham sejauh apa kapasitas mereka sebagai aktor di kawasan. Sejak periode kedua presidensi SBY, para pembuat kebijakan Indonesia secara resmi menggunakan istilah 'kekuatan menengah' sebagai status yang ingin dikejar oleh Indonesia (Karim, 2018: 10). Jadi, secara politis ASEAN adalah aktor *middle power* atau kekuatan menengah. Secara geografis, Marty menyebut posisi Asia Tenggara sebagai *triangular spanning two oceans* atau segitiga yang membentang di dua samudera (Natalegawa, 2013: 1). Maksudnya adalah ASEAN berada di tengah-tengah negara besar yang membentuk segitiga, yakni Jepang, Australia, dan India. Ini artinya, lalu lintas laut di dalam kawasan akan menjadi krusial bagi perdagangan dunia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan SBY menganggap bahwa Indo-Pasifik merupakan satu kawasan yang berkelanjutan.

Namun, AOIP justru menganggap Indo-Pasifik terbentuk dari dua wilayah yang berbeda. AOIP menolak Indo-Pasifik sebagai ruang teritorial yang berkelanjutan, sebaliknya Indo-Pasifik terdiri dari dua wilayah yaitu Asia-Pasifik dan Samudera Hindia (Thu, 2020: 56). ASEAN memiliki tiga alasan ketika menolak konsep FOIP Jepang. Pertama, terminologi Indo-Pasifik sangat ambigu pada masa itu, sehingga ASEAN tidak ingin menandatangani perjanjian apapun yang belum jelas. Kedua, ASEAN takut dianggap memusuhi Cina karena nuansa FOIP sangat kontras terhadap eksistensi Cina. Terakhir, ASEAN yang terdiri dari berbagai negara membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berdiskusi dan mengambil posisi terhadap dinamika kawasan (Thu, 2019). Maka dari itu, ASEAN memilih menciptakan pandangan sendiri terhadap Indo-Pasifik. Jose Antonio Morato Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, juga mengatakan bahwa proposal Indo-Pasifik Indonesia berbicara soal pendekatan lunak dan orang ke orang", sedangkan Amerika Serikat dan Jepang berbicara tentang kekuatan militer (Scott, 2019: 207). AOIP di era Jokowi berusaha berdiri pada 2 kaki, menolak FOIP dan memodifikasi konsep tersebut hingga sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota ASEAN.

Dynamic equilibrium berusaha mendorong ASEAN sebagai aktor utama dalam kerja sama pembangunan arsitektur kawasan. Marty melihat adanya peluang bagi kemunculan aktor organisasi internasional untuk menjadi *driving force* kerjasama kawasan. Kemudian, saat Indonesia menjadi ketua ASEAN, Menteri Marty berinisiatif untuk mempertegas kepada dunia bagaimana cara ASEAN memandang Indo-Pasifik. Dalam upaya mempertahankan sentralitasnya, ASEAN ditantang bukan hanya dengan menyediakan tempat bagi aktor lain tetapi dapat bertindak sebagai penyelenggara, pemimpin, atau penggerak proses negosiasi dalam forum

regional (Mueller, 2019: 181). Pandangan soal posisi ASEAN di kawasan juga disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Menurut Yayan Mulyana (2022) *dynamic equilibrium* menganggap ASEAN sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang “menyerap” dominasi salah satu negara dalam rangka menciptakan dan menjaga rasa saling percaya dari berbagai pihak yang terlibat. Inilah yang menjadi konsentrasi Marty ketika memimpin ASEAN.

Memasuki era Jokowi banyak penelitian yang menganggap bahwa ia telah melakukan redefinisi lingkaran konsentris Indonesia. Namun, belakangan ini Jokowi kembali memainkan gaya kebijakan luar negeri sebagai pemimpin ASEAN. Alih-alih meninggalkan ASEAN, Jokowi justru mengintegrasikan ASEAN dengan konsep Indo-Pasifik yang diartikan sebagai upaya Indonesia dalam mengajak ASEAN turut serta keluar dari lingkungan konsentris Asia Tenggara (Rosyidin, 2019: 79). Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga mempertegas sentralitas ASEAN dengan pernyataan:

Indonesia terus mendorong kerja sama konkrit yang inklusif dalam implementasi AOIP. Implementasi AOIP harus diurus utamakan dalam semua kegiatan ASEAN. Dalam konteks inilah, atas inisiatif Indonesia, telah disepakati *ASEAN leaders declaration on mainstreaming 4 priority areas on AOIP within ASEAN led-mechanism* (Marsudi, 2023).

Hal ini menjadi pertanda bahwa Indonesia tidak ingin tampil menjadi entitas tunggal yang mendominasi kawasan.

Sebenarnya, tidak ada presiden yang melakukan redefinisi lingkaran konsentris Indonesia dan ASEAN. Pada implementasinya, Indonesia dan negara-negara ASEAN lain masih cenderung menjadikan ring-ring terluar sebagai mitra penting terutama dalam kerja sama ekonomi, seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa (Raharja, 2022). Saat ini, Indonesia justru mengarahkan ASEAN untuk berfokus pada Indo-Pasifik yang menjadi lingkungan terdekatnya. Indonesia akan tetap memprioritaskan ASEAN dan ASEAN sudah seharusnya memprioritaskan Indo-Pasifik. Baik kebijakan Retno Marsudi maupun Marty Natalegawa sama-sama mengarahkan ASEAN untuk menjadi aktor penting kawasan. Marty bahkan mengapresiasi pemikiran dan hasil kerja Menteri Retno karena idealisme yang dipegang oleh Konsep Indo-Pasifik akan membuat ASEAN memainkan peran sentral, bukan mengangkat Indonesia atau negara anggota lainnya secara khusus (Cook, 2018). Jadi, kedua gagasan justru memperjelas konsentris Indonesia dan ASEAN.

Doktrin Natalegawa berusaha mendorong ASEAN untuk membangun arsitektur regional yang inklusif. Tujuan doktrin keseimbangan dinamis adalah melibatkan semua kekuatan utama relevan di dalam kerangka kerja yang lebih kooperatif (Choir, William, & Zahirah, 2018: 131). Doktrin Natalegawa juga menyiratkan sikap proaktif politik luar negeri Indonesia. Kebijakan *dynamic Equilibrium* mampu merespon kebangkitan Cina dengan sangat baik melalui masuknya kekuatan besar selain Cina dalam forum dan menuju keseimbangan kekuatan di kawasan (tidak ada negara yang mendominasi) (Putra, 2015: 195). Sangat disayangkan, implementasi dari kebijakan ini tidak maksimal karena berakhirnya masa jabatan kabinet SBY.

Di periode lain, kemunculan AOIP dianggap sebagai sikap reaktif kebijakan luar negeri Indonesia terhadap rivalitas kawasan. Dalam konteks rivalitas adidaya, AOIP adalah respon terhadap tantangan yang berkembang dan berasal dari tekanan eksternal yang mungkin mengancam persatuan, melemahkan relevansi, dan menggerogoti sentralitas ASEAN (Sukma, 2019: 3). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa AOIP “memperbaharui” mekanisme ASEAN. AOIP dirancang untuk menggunakan pendekatan dua blok, yaitu memperkuat *ASEAN Led-Mechanism* serta menghubungkan mekanisme tersebut dengan mekanisme regional non-ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Di samping itu, AOIP juga sering dikritik karena dianggap menurunkan semangat multilateralisme. Selama tahun-tahun awal kepresidenan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia sangat transaksional dengan fokus utama pada hubungan bilateral, bukan pada peran kepemimpinan dalam ASEAN (Anwar, 2020: 124). Namun, akhir-akhir ini Jokowi kembali mengarahkan kebijakannya pada ASEAN. Indonesia mengambil banyak keuntungan ekonomi dari peran kepemimpinannya di ASEAN. Misalnya saja dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Indonesia mengusung tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” yang dengan jelas menggambarkan kepentingan ekonomi Indonesia dibalik kepemimpinannya di ASEAN. Menlu Retno menyatakan bahwa:

Indonesia akan terus menekankan bahwa Indo-Pasifik harus didekati tidak saja dari aspek *security* namun juga dari aspek pembangunan ekonomi secara inklusif... Indonesia akan menyelenggarakan *flagship event*... yaitu *ASEAN Indo-Pacific Forum* dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu *Creative Economy, Youth Conference on Digital Economy for SDG's, Infrastructure Forum, and Business and Investment Summit* (Marsudi, 2023).

Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa bidang ekonomi masih menjadi fokus utama kerja sama Indo-Pasifik.

Dalam kesempatan lain, pemerintahan Jokowi mulai melakukan “*re-branding*” terhadap sikap kebijakan luar negeri Indonesia. Alih-alih mengamini AOIP sebagai respon reaktif dari dinamika kawasan, ASEAN justru mendeklarasikan bahwa dirinya berusaha menjadi aktor yang proaktif di bawah naungan AOIP. Hal ini ditegaskan melalui *ASEAN Leader’s Declaration on Mainstreaming Four Priority Areas of The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific within ASEAN-Led Mechanism* bahwa “...sentralitas dan persatuan ASEAN dalam arsitektur kawasan yang terus berkembang, dan kebutuhan ASEAN untuk mengambil peran proaktif...” (ASEAN, 2022). Namun, ASEAN masih memerlukan banyak waktu untuk membuktikan itu.

Kedua gagasan konsisten untuk melindungi preferensi Indonesia di kawasan sambil mendorong pengaruh ASEAN pada jangkauan yang lebih luas. Sebagai negara *middle power*, Indonesia sadar betul bahwa tindakan inklusif yang sangat mengandalkan partisipasi dari *major relevance power* dapat menjadikan Indonesia sebagai mitra netral yang dipercaya (Choir, William, & Zahirah, 2018: 131). Dengan cara ini, Indonesia dan ASEAN akan dilihat sebagai mitra strategis yang kooperatif sehingga kerja sama di kawasan dapat terus terwujud.

Spirit Liberal-Institusionalisme

Relasi negara-negara adidaya (*great powers*), antara AS dan Cina, terbilang sangat fluktuatif. Mereka memiliki berbagai cara untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan. Contohnya seperti pertemuan negara-negara Quad (*Quadrilateral Security Dialogue*) pada bulan Mei 2022 yang lalu. AS, Jepang, Korea Selatan, serta India melakukan pertemuan untuk memperkuat “tatanan internasional yang bebas” di Indo-Pasifik (Arbar, 2022). Wang Yi, menteri luar negeri Cina, tidak segan memberi peringatan terhadap rencana tersebut. Wang menganggap kelompok Quad sebagai “NATO di Indo-Pasifik”, menuduhnya “mendukung mentalitas Perang Dingin”, serta “memicu persaingan geopolitik yang lebih sengit” (Gan, 2022). Aksi dan reaksi di antara keduanya menyiratkan situasi persaingan yang turut membuat kawasan Asia Pasifik dan Laut Hindia diliputi rasa tidak aman dan tidak menentu.

Liberal-institusionalisme sangat realistis dalam memandang fenomena ini. Kaum institusionalis tidak mengelak pada fakta bahwa dunia itu anarki. Anarki diartikan sebagai kurangnya pemerintahan bersama dalam politik dunia, secara tetap, tetapi negara-negara memiliki pola interaksi serta cara terstruktur yang berbeda satu sama lain (Axelrod &

Keohane, 1985: 226). Negara dipandang sebagai entitas yang sulit diatur dan menimbulkan pola interaksi yang kacau. Pada poin dimana anarkisme dunia tidak dapat dihindari lagi, dibutuhkan solusi konkrit. Menurut kaum liberal, kerjasama diperlukan untuk mencapai perdamaian. Dua syarat utama agar kerja sama dapat berkembang adalah didasarkan pada timbal balik dan bayangan soal masa depan setelah kerja sama terlaksana (Axelrod, 1984: 173). Maka dari itu, liberalisme selalu mengedepankan hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*). Namun, dalam struktur yang anarki, kerja sama hanya dapat tercapai jika masing-masing negara mampu menegosiasikan kepentingan dan nilai-nilai mereka pada titik tertentu. Sehingga, liberalisme institusional menawarkan jawaban berupa rezim internasional.

Rezim internasional berperan dengan cukup signifikan hingga hari ini. Menurut Levy, *et. al* (1995) rezim internasional adalah institusi sosial yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur, dan program yang disepakati yang mengatur interaksi para aktor di bidang tertentu. Selain itu, rezim internasional tidak menggantikan hubungan timbal balik para aktor tetapi justru memperkuat dan melembagakannya (Axelrod & Keohane, 1985: 250). Dengan kata lain, kerja sama yang terjadi di antara para aktor adalah kerja sama berbasis aturan (*rule-based cooperation*). Rezim dan institusi memang menekankan penggunaan multilateralisme dan kerja sama untuk mendapatkan kepentingan negara (Devitt, 2011: 2). Jadi, konsep ini didesain untuk mengikat negara-negara agar berkomitmen pada suatu preferensi tertentu. Dengan kata lain, rezim internasional menginginkan pola hubungan yang tidak hierarkis.

Kerja sama berbasis aturan ini dapat kita temui dalam *dynamic equilibrium* dan AOIP. Marty menyampaikan bahwa entitas kawasan perlu mempersiapkan diri untuk bekerja terhadap perluasan traktat persahabatan dan kerja sama Indo-Pasifik (CSIS, 2013). Pada masa yang berbeda, AOIP lahir dan secara eksplisit juga menegaskan bahwa kerja sama berbasis aturan menjadi fokus ASEAN dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik. Hal ini dapat kita temui dalam Dokumen Akhir *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Pertama, salah satu tujuan terbentuknya gagasan ini ialah berusaha menawarkan pandangan untuk memandu kerja sama di kawasan (ASEAN, 2019: 2). Kedua, prinsip-prinsip yang melandasi kerja sama Indo-Pasifik harus berdasarkan kerangka kerja sama berbasis aturan (*rule-based framework*) (ASEAN, 2019: 2). Kedua gagasan ternyata konsisten untuk menghadirkan kerja sama berbasis aturan di kawasan.

Pada dasarnya, tidak ada hubungan hierarkis dalam tataran internasional karena aktor-aktor internasional merupakan entitas yang sederajat. Oleh sebab itu, rezim internasional diciptakan lebih fleksibel,

tidak hierarkis, dan tidak dapat benar-benar memaksa. Peneliti membedakan hukum keras dan hukum lunak dengan cara menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum menimbulkan konsekuensi hukum, sementara pelanggaran norma politik menimbulkan konsekuensi politik (Shelton, 2009: 71). Perbandingan dua jenis hukum ini berada dalam konteks aturan untuk sekumpulan individu dalam sebuah negara dan aturan untuk negara-negara berdaulat yang ada di dunia. Sanksi yang dijatuhkan kepada “pelanggar” pun bukan berupa sanksi pidana, melainkan hanya sebatas sanksi sosial.

Meskipun demikian, rezim internasional mampu membuat negara-negara berada dalam suatu “tingkat kepatuhan”. Menurut Chayes (1993: 90) ada beberapa situasi umum yang dapat menggerakkan kekuatan politik demi mencapai kepatuhan yang lebih besar. Situasi pertama adalah ketika negara-negara yang berkomitmen pada rezim merasakan bahwa titik kritis sudah dekat, sehingga peningkatan kepatuhan diperlukan untuk mempertahankan rezim. Kedua, negara-negara yang memiliki komitmen tinggi pada kepatuhan berusaha untuk meningkatkan standar tersebut kepada negara lain. Terakhir, mengkampanyekan peningkatan tingkat kepatuhan pada rezim perjanjian yang akan segera ditinggalkan oleh negara bersangkutan. Dengan kata lain, negara atau aktor yang terlibat di dalam rezim memiliki kesadaran untuk patuh kepada rezim perjanjian internasional karena kondisi tertentu. Tingkat kepatuhan ini memiliki hubungan dekat dengan besaran kepentingan negara yang terlibat di dalam kerja sama.

Baik *dynamic equilibrium* maupun AOIP sama-sama memberikan rekomendasi tindakan bagi negara-negara mitra. Gagasan-gagasan ini lebih terdengar seperti ajakan bagi aktor-aktor regional untuk dapat bekerja sama secara damai. *Dynamic equilibrium* sendiri dicetuskan untuk mempromosikan rasa tanggung jawab bersama dalam usaha keras menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan (CSIS, 2013). Sejalan dengan gagasan Marty, AOIP pun menegaskan bahwa salah satu tujuan terbentuknya ide ini adalah mempromosikan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dalam mengatasi tantangan bersama (ASEAN, 2019: 2). Dari sini, kita dapat melihat bahwa kedua kebijakan mengupayakan adanya keteraturan melalui kesadaran dari negara-negara kawasan. Menurut Goh (2014), kerjasama dan institusi multilateral memang dapat membantu untuk melegitimasi serta menjinakkan kekuatan yang tidak setara dengan cara melembagakan dominasi struktural kekuatan-kekuatan besar secara berkelanjutan serta mengikat semua anggota menggunakan aturan perilaku normatif. Dengan begitu,

kepentingan negara-negara di kawasan akan tercapai tanpa harus menimbulkan konflik besar.

Indonesia terus mendorong ASEAN untuk menjadi poros ketiga kawasan. Poros ketiga tidak boleh memiliki kecenderungan ke AS maupun Cina, juga tidak boleh mengkonfrontasi kedua negara adidaya. Dalam menangani situasi ini, liberal-institusionalisme menyarankan pembentukan institusi atau organisasi internasional. Institusi memfasilitasi kerja sama dan meliberalisasi dengan cara membangun ekspektasi timbal balik yang lebih stabil, meningkatkan transparansi, menurunkan biaya informasi, menyiapkan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan kesepakatan (Norkevičius, 2014: 100). Kemunculan institusi internasional ataupun regional juga dapat dianggap sebagai strategi mengurangi jumlah pemain. Taktik dekomposisi antar aktor terkadang dapat meningkatkan prospek kerja sama (Oye, 1984: 21). Maka dari itu, kehadiran ASEAN sudah cukup bijak untuk menangani dinamika Indo-Pasifik.

Indonesia sangat antusias dalam menyokong perkembangan ASEAN. Pada masa kepresidenan SBY, Indonesia selalu bertindak sebagai perwakilan dari ASEAN dalam forum G20. Kemudian, ASEAN mengusulkan pembentukan *contact group ASEAN G20* dalam rangka konsolidasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN (Karim, 2018: 11). Lalu, gagasan ini dibawah oleh Indonesia pada pembahasan Forum G20. Dunia berharap bahwa Indonesia dapat berperan sebagai pemimpin kawasan yang aktif dengan tetap menjaga pentingnya dan relevansi ASEAN dalam proses pembangunan kelembagaan di Asia Tenggara (Karim, 2018: 11). Ini merupakan salah satu contoh konkrit antusiasme Indonesia.

Sentralitas ASEAN pun telah dipertahankan, bukan hanya oleh negara-negara anggota melainkan oleh negara mitra eksternal. AOIP dan Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat memiliki prinsip dasar yang relevan dalam mempromosikan arsitektur regional yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan, di mana ASEAN adalah pusatnya, bersama dengan mitra yang berbagi tujuan ini (ASEAN, 2022). Negara-negara besar menghargai dan berusaha konsisten terhadap peran ASEAN di Indo-Pasifik. Strategi Indonesia untuk menaruh ASEAN pada lini terdepan dalam melindungi preferensi negara-negara kawasan tampaknya sudah tepat untuk saat ini. Ini menunjukkan bahwa ASEAN mulai mendapat pengakuan sebagai organisasi yang mampu menciptakan keteraturan kawasan.

Diplomasi lunak (*soft diplomacy*) merupakan ciri khas umum yang ditonjolkan oleh liberal-institusionalisme. Menurut Axelrod, landasan terjalannya kerjasama bukan terletak pada kepercayaan, melainkan

kelanggengan hubungan. Kondisi yang kondusif sangat diperlukan agar para aktor dapat bekerja sama satu sama lain melalui pembelajaran *trial-and-error* tentang saling menghargai, meniru kesuksesan aktor lain, atau bahkan menyeleksi strategi yang ingin diterapkan (Axelrod, 1984: 182). Maka dari itu, aktor-aktor internasional dituntut untuk dapat berkonsentrasi pada cara-cara yang menghasilkan interaksi strategis sehingga dapat menghadirkan kerja sama di bidang hubungan internasional tertentu (Norkevičius, 2014: 101).

Indonesia pun telah menerapkan diplomasi lunak, baik melalui dialog maupun negosiasi. Diplomasi ini erat kaitannya dengan kekuatan lunak (*soft power*). Kekuatan lunak menekankan pada pendekatan persetujuan yang membuat pihak lain melakukan apa yang kita inginkan bukan karena berada dalam tekanan, melainkan karena merasa sepaham dengan pemikiran atau tindakan kita (Rosyidin M. , 2014: 7). Indonesia telah menerapkan diplomasi lunak dalam menghadapi berbagai dilema kawasan. Menurut Sebastian (2012), Indonesia memiliki strategi diplomasi tersendiri. Pertama, menyadari kebutuhan negara-negara tetangga dalam memiliki struktur yang kredibel untuk berkonsultasi. Kedua, menginginkan peran *middle power* yang independen untuk menegaskan posisi diri. Ketiga, menegaskan pemikiran ASEAN tentang keamanan dalam menghadapi tantangan jangka panjang secara memadai. Dari pola yang dipaparkan oleh Sebastian, kita dapat melihat bahwa Indonesia menaruh banyak perhatian pada lingkungan strategisnya, terutama pada ASEAN. Strategi ini ternyata cukup efektif untuk menaikkan profil negara serta mendorong peran ASEAN pada cakupan yang lebih luas.

Dynamic equilibrium pun sangat menekankan diplomasi lunak. Beberapa forum diskusi, negosiasi, dan perjanjian kerja sama telah terlaksana. Hal ini juga telah disampaikan oleh Marty:

Maka dari itu, komunikasi harus didirikan... pembentukan garis komunikasi, terutama di tengah krisis, memiliki mengedepankan dialog dibandingkan konfrontasi. Bukanlah kelemahan atau persetujuan tanpa izin, melainkan lebih kepada menguraikan dan menyampaikan maksud, tanpa prasangka buruk dan mengorbankan prinsip... Modalitas Pasifik adalah untuk membangun rasa saling percaya dan kepercayaan diri" (Natalegawa, 2013).

Penekanan pada komunikasi mengindikasikan adanya corak liberal-institusionalisme dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Marty sangat

optimis bahwa doktrin regional yang ia gagas dapat mendorong negara-negara kawasan untuk mengedepankan cara-cara lunak.

Di periode lain, dokumen AOIP telah membuat para pemimpin negara ASEAN mencapai sebuah hasil mufakat tentang proyek-proyek kerja sama kawasan. Proyek implementasi AOIP adalah proyek dan kegiatan yang diprakarsai oleh ASEAN, bersama ASEAN beserta mitra-mitra eksternal, bersama pihak berkepentingan di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia secara terbuka dan inklusif, atau telah disetujui oleh ASEAN (ASEAN, 2022). Pemerintahan Jokowi konsisten dalam mempromosikan AOIP bahkan di tengah Pandemi Covid-19. Komitmen ini kembali dipertegas dalam ASEAN – U.S. Special Summit, 2022 yang tertulis “Menegaskan kembali lebih lanjut komitmen bersama kami untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, serta penyelesaian perselisihan secara damai, termasuk penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, sesuai dengan hukum internasional” (ASEAN, 2022). Ini adalah sinyal baik bagi kondusifitas regional dan global.

Dalam mencapai perdamaian, kaum liberal meyakini bahwa kesejahteraan adalah kuncinya. Pembangunan ekonomi diklaim selalu menjadi inti dalam sistem kepercayaan regionalisme karena menjadi sarana untuk pembangunan negara-bangsa, stabilitas, dan ketahanan regional (Jetschke, 2012: 332). Klaim lain dari liberal-institusionalisme adalah penciptaan pasar yang terintegrasi secara global. Klaim ini didasari pada asumsi bahwa pasar dan prinsip-prinsip konsumeris dapat diterapkan secara universal karena menjadi kepentingan pribadi bagi semua manusia terlepas dari konteks sosial mereka (Steger & Roy, 2010: 53).

Asia Tenggara pun sangat terbuka terhadap perdagangan, investasi, maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Tidak sampai disitu, saat ini ASEAN sudah sangat terbuka kepada aktor manapun yang ingin bekerja sama di dalam lingkup Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik. ASEAN banyak memanfaatkan kemitraan dengan forum eksternal dalam pengembangan ekonomi kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, menyampaikan bahwa ASEAN perlu memanfaatkan pencapaian yang disepakati dalam G20 di bidang ketahanan pangan dan energi, stabilitas keuangan dan, berpegang pada prinsip-prinsip ASEAN yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di ASEAN (Limanseto, 2023). G20 termasuk salah satu mitra strategis ASEAN. Semangat perdagangan juga terpancar melalui Pertemuan Khusus ASEAN – AS. Kedua pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam mempromosikan perdagangan dan investasi serta memfasilitasi rantai pasokan global dan konektivitas regional yang mulus,

termasuk untuk barang-barang penting seperti pasokan medis, obat-obatan, vaksin, makanan dan produk pertanian, komoditas, produk teknologi tinggi, dan lainnya. pasokan dan layanan penting, serta berkontribusi pada pemulihan dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan (ASEAN, 2022). Ini merupakan kabar-kabar baik bagi Asia Tenggara.

Spirit perdagangan khas liberal-institusionalisme sangat lekat dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN. Hal ini pun divalidasi oleh pernyataan Jokowi dalam *KTT ASEAN-Kanada Commemorative Summit*, Presiden menyampaikan bahwa ditengah dunia yang sedang tidak kondusif, justru menjadi lebih penting untuk mengisinya dengan kerja sama konkret yang saling menguntungkan (Moegiarso, 2022). Kata “menguntungkan” ini secara implisit mengacu pada keuntungan ekonomi. Dalam dokumen AOIP, salah satu pilar yang menjadi prioritas kerja sama ASEAN bersama negara mitra ialah pilar kerja sama ekonomi. ASEAN menawarkan banyak daftar kerja sama ekonomi seperti kerja sama selatan-selatan, memfasilitasi perdagangan, infrastruktur, dan jasa logistik, ekonomi digital, kerja sama UMKM, memperdalam integrasi ekonomi, memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan, memperkuat dan mempromosikan perdagangan dan investasi, bahkan hingga mempersiapkan revolusi industri ke-4 (ASEAN, 2019: 5). Inilah landasan kuatnya komitmen kerja sama ekonomi ASEAN di era Joko Widodo.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa perbedaan kedua gagasan terletak pada komponen prinsip-prinsip gagasan, luaran gagasan, dan pandangan gagasan terhadap kawasan Indo-Pasifik. Secara kuantitas prinsip, *dynamic equilibrium* memiliki jumlah yang lebih sedikit dan sederhana dibandingkan dengan AOIP. Lebih lanjut lagi, Doktrin Natalegawa adalah doktrin ketua ASEAN yang didorong untuk menjadi doktrin kawasan serta belum melalui tahap negosiasi dengan negara anggota. Sedangkan, AOIP merupakan kerangka kerja sama konkret yang dihasilkan dari negosiasi panjang dengan negara anggota. Terakhir, Doktrin Natalegawa menganggap wilayah ini adalah satu kesatuan dengan istilah *triangular spanning two oceans*. Sedangkan, AOIP menganggap Indo-Pasifik terdiri atas dua buah ruang teritori yang berbeda, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Lebih lanjut lagi, persamaan kedua gagasan juga dapat ditemui dalam dua komponen. Persamaan pertama ditemukan dalam komponen peran sentral ASEAN di dalam gagasan. Kebijakan-kebijakan ini menaruh ASEAN sebagai sentral dari seluruh aktivitas kerja sama di Indo-Pasifik.

Artinya, Indonesia melalui Doktrin Natalegawa dan AOIP masih mempertahankan prioritas kebijakan luar negerinya untuk ASEAN. Persamaan kedua adalah orientasi gagasan dimana keduanya sama-sama memepatkan ASEAN sebagai aktor kekuatan menengah. Aktor kekuatan menengah memiliki orientasi pada perdamaian, dalam konteks ini megacu pada perdamaian di Indo-Pasifik. Tandanya, ASEAN harus memimpin dan menyediakan wadah kerja sama.

Terakhir, tulisan ini pun membuktikan bahwa kedua gagasan lekat dengan spirit liberal-institusionalisme. Keduanya dapat dikategorikan sebagai rezim internasional karena telah memfasilitasi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Mereka dapat menawarkan kerja sama berbasis aturan (*rule-based*) serta mendorong negara-negara agar patuh terhadap aturan tersebut. Kemudian, Indonesia telah berhasil menyokong ASEAN sebagai aktor non-negara dalam tatanan internasional. Hal ini juga didukung oleh komitmen dalam mengedepankan dialog dan negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Terakhir, kemajuan pasar bebas dan masifnya kerja sama di bidang ekonomi kawasan telah membuahkan perkembangan ekonomi bagi Asia Tenggara dan negara-negara sekitar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa *dynamic equilibrium* dan AOIP telah memperkaya dan memperkuat teori liberal-institusionalisme.

Penelitian ini telah menjabarkan komponen-komponen yang sama sekaligus berbeda dari kedua gagasan. Namun, belum menjelaskan mengapa kedua gagasan memiliki persamaan sekaligus perbedaan karakteristik. Penelitian di masa mendatang dapat mengangkat hubungan kausalitas dari perbandingan karakteristik kedua gagasan ditinjau melalui struktur dunia sebelum dan pada saat gagasan tercipta dan faktor idiosinkratik elit di balik *dynamic equilibrium* dan AOIP. Selain meneliti struktur dunia, penelitian tentang pengaruh individu dalam kebijakan luar negeri juga sama-sama penting. Penelitian mengenai kedua gagasan ini perlu dilanjutkan karena menyangkut tujuan besar Indonesia di Indo-Pasifik.

Daftar pustaka

- Adhistry, A.A. (2015). Penerapan Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anwar, D.F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96 (1) , pp. 111-129.
- Arbar, T.F. (2022) China: Strategi AS Picu Perpecahan di Kawasan Indo-Pasifik [Online], 23 Mei. Available at: <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523141619-4->

- 341098/china-strategi-as-picu-perpecahan-di-kawasan-indo-pasifik>.
- ASEAN (2019). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific [Online], June 23. Available at: <<https://asean.org/speechandstatement/asean-outlook-on-the-indo-pacific/>>.
- ASEAN (2022). ASEAN Leaders' Declaration on Mainstreaming Four Priority Areas of The ASEAN Outlook on The Indo-Pacific within ASEAN-Led Mechanisms [Online], November 11. Available at: <<https://asean.org/wp-content/uploads/2022/11/25-ASEAN-Leaders-Declaration-on-Mainstreaming-Four-Priority-Areas-of-the-ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific-within-ASEAN-led-Mechanisms.pdf>>.
- ASEAN (2022). Home: Statements: Joint Vision Statement of The ASEAN-U.S. Special Summit, 2022 [Online], May 14. Availbale at: <<https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-ASEAN-US-Special-Summit-2022-Joint-Vision-Statement.pdf>>.
- Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Axelrod, R. & Keohane, R.O. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. *World Politics*, 38(1), pp. 226-254.
- Chang, F.K. (2011). China's Naval Rise and the South China Sea: An Operational Assessment. *Orbis*, 56 (1), pp. 19-38.
- Chayes, A. & Chayes, A.H. (1993). On Compliance. *International Organization*, 47 (2) spring, pp. 65-91.
- Choir et al. (2018). *The Missing Link between Dynamic equilibrium Doctrine and Indonesia's Interest in South Pacific*. Airlangga Conference on International Relations, pp. 130-138.
- Collier, D. (1993). The Comparative Method. In: Finifter, A.W. (Ed.), *Political Science: The State of the Discipline II*. Washington, DC: American Political Science Association, pp. 105-119.
- Cook, E. (2018). What Does Indonesia's Own Indo-Pacific Strategy Look Like? [Online], February 8. Available at: <<https://thediplomat.com/2018/02/what-does-indonesias-own-indo-pacific-strategy-look-like/>>.
- CSIS (2013). The Indonesia Conference: His Excellency Dr. R. M. Marty M. Natalegawa Minister of Foreign Affairs [Online], 18 Mei. Available at: <<https://www.youtube.com/watch?v=OQahpLEc7Ss>>.
- Devitt, R. (2011). Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo? [Online], September 1. Available at: <<https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/>>.

- Esser, F. & Vliegenthart, R. (2017). Comparative Research Methods. In: Davis, J.M.C.S. & Potter, R.F. (Eds.), *The International Encyclopedia of Communication Research Methods*. John Wiley & Sons Inc, pp. 1-22.
- Febrina et al. (2018). ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang. *Indonesian Perspective*, 3 (2), pp. 145-158.
- Fels, E. (2016). Opening the Floor: The Rivalry Between Eagle and Dragon in Asia-Pacific. In: E. Fels (Ed.), *Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance*. Cham: Springer.
- Gan, N. (2022). China is Alarmed by the Quad. But Its Threats are Driving the Group Closer Together [Online], May 23. Available at: <<https://edition.cnn.com/2022/05/23/china/quad-summit-china-threat-analysis-intl-hnk-mic/index.html>>.
- Glaser, B.G. (1965). The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis. *Social Problems*, 12 (4), pp. 436-445.
- Goh, E. (2014). ASEAN-led Multilateralism and Regional Order: The Great Power Bargain Deficit [Online], May 23. Available at: <<https://theasanforum.org/asean-led-multilateralism-and-regional-order-the-great-power-bargain-deficit/>>.
- Ha, H.T. (2019). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Old Wine in New Bottle? *ISEAS Perspective* (51), pp. 1-8.
- Hasian, K.M. (2021). *Rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Asia Pasifik*. Center fo Area Studies Indonesia Institute of Sciences (P2W - LIPI), January 24.
- Jati, W.R. interview by Ardianti, D.E. (2023). Reposisi Peran ASEAN di Indo-Pasifik: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 14 Januari.
- Jetschke, A. (2012). ASEAN. In: M. Beeson & R. Stubbs (Eds.), *Routledge Handbooks of Asian Regionalism*. New York: Routledge, pp. 327-337.
- Karim, M.F. (2018). Middle Power, Status-Seeking and Role Conceptions: the Cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, 72 (4), pp. 1-21.
- Kementrian Luar Negeri (2019). KTT ASEAN Adopsi Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik [Online], June 23. Available at: <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/388/berita/ktt-asean-adopsi-outlook-asean-mengenai-indo-pasifik>>.
- Keohane, R. O. (1982). The Demand for International Regimes. *International Organization*, 36 (2) Spring, pp. 325-355.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony*. New Jersey: Princeton University Press.

- Keohane, R. O. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 20 (1), pp. 39-51.
- Levy et al. (1995). The Study of International Regimes. *European Journal of International Relations*, 1 (3), pp. 267-330.
- Limanseto, H. (2023). Publikasi: Siaran Pers: Fokus Pada Penguatan Ekonomi Kawasan yang Tumbuh Cepat, Inklusif, dan Berkelanjutan, Indonesia Jalankan Keketuaan ASEAN 2023 [Online], 19 Januari. Available at: <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4869/fokus-pada-penguatan-ekonomi-kawasan-yang-tumbuh-cepat-inklusif-dan-berkelanjutan-indonesia-jalankan-keketuaan-asean-2023>>.
- Marsudi, R.L.P. (2023). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023: Leadership in a Challenging World, Januari 11. Jakarta: Kompas TV.
- Milner, A. (2019). Repositioning Indonesia – Thoughts on the Indo-Pacific. *Journal of ASEAN Studies*, 7 (1), pp. 58-72.
- Moegiarso, S. (2022). Publikasi: Siaran Pers: Dalam KTT ASEAN-Kanada Commemorative Summit, Presiden Joko Widodo Ajak Kanada secara Konkret Menjadi Mitra ASEAN untuk Implementasi AOIP [Online], 12 November. Available at: <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4712/dalam-ktt-asean-kanada-commemorative-summit-presiden-joko-widodo-ajak-kanada-secara-konkret-menjadi-mitra-asean-untuk-implementasi-aqip>>.
- Morgenthau, H. (1997). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* 6th edn. Beijing: Peking University Press.
- Morrison, W.M. (2019). China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States. Congressional Research Service 38, pp. 1-37.
- Mueller, L.M. (2019). ASEAN Centrality under Threat – the Cases of RCEP and Connectivity. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 8 (2), pp. 177-198.
- Mulyana, Y.G.H interview by Ardianti D.E. (2022). Reposisi Peran ASEAN di Indo-Pasifik: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 6 Desember.
- Natalegawa, M.M. (2013). *An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Norkevičius, M. (2014). Regional Institutionalism in South East Asia. *Societal Studies*, 6 (1), pp. 98-113.
- Oye, K.A. (1984). Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies. *World Politics*, 38 (1), pp. 1-24.
- Pettiford, L. & Pettiford, L. (2009). *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Poling, G.B. (2013). Dynamic equilibrium: Indonesia's Blueprint for a 21st Century Asia Pacific [Online], March 8. Available at: <<https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesias-blueprint-21st-century-asia-pacific>>.
- Putra, B.A. (2015). Indonesia's Leadership Role in ASEAN: History and Future Prospect. *International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 1 (2), pp. 188-197.
- Raharja, D.P, interview by Ardianti, D.E. (2022). Reposisi Peran ASEAN di Indo-Pasifik: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 21 Desember.
- Rosyidin, M. (2014). Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5 (1), pp. 3-22.
- Rosyidin, M. (2019). *Indonesia Menuju Kekuatan Global Abad 21: Politik Luar Negeri di Era Joko Widodo*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38 (2), pp. 194-216.
- Sebastian, L.C. (2012). Indonesia's regional diplomacy: Imperative to maintain ASEAN cohesion [Online], July 23. Available at: <<https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/1794-indonesias-regional-diplomacy/>>.
- Sebastian, Leonard C. (2014). Indonesia's Dynamic equilibrium and ASEAN Centrality. In: *Prospects of Multilateral Cooperation in the Asia Pacific: To Overcome the Gap of Security Outlooks*. National Institute for Defense Studies, pp. 9-24.
- Sharma, A. & Blaxland, J. (2022). Home: Australian Outlook: Shinzo Abe: Remembering the Architect of Indo-Pacific Strategy [Online], July 25. Available at: <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/shinzo-abe-remembering-architect-of-the-indo-pacific-strategy/>.
- Shelton, D. (2009). Soft Law. In: D. Armstrong (Ed.), *Routledge Handbook of International Law*. London: Routledge, pp. 68-80.
- Steger, M.B. & Roy, R.K. (2010). Second-Wave Neoliberalism in the 1990's: Clinton's Market Globalism and Blair's Third Way. In: Steger, M.B. & Roy, R.K. *Neoliberalism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press Inc, pp. 50-75.

- Stein, A. (2008). Neoliberal Institutionalism. In: Reus-Smit, C. & Snidal, D. eds. *The Oxford Handbook of International Relations*. New York: Oxford University Press, pp. 201-221.
- Strangio, S. (2020). *The Dragon's Shadow*. New Haven: Yale University Press.
- Sukma, R. (2019). Indonesia, ASEAN, and the Indo-Pacific: Strategic Necessity or Norm-Setting Exercise? [Online], August 30. Available at: <<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/30/indonesia-asean-and-the-indo-pacific-part-2-of-2.html>>.
- Thu, H.L. (2019). The Strategist: The long and winding way to the Indo-Pacific [Online], June 29. Available at: <<https://www.aspistrategist.org.au/the-long-and-winding-way-to-the-indo-pacific/>>.
- Thu, H.L. (2020). Southeast Asia and Indo-Pacific Concepts: From Resistance to Reticence to Reaction. *Security Challenges*, 16 (3), pp. 53-57.